

**ANALISIS KINERJA ANGGARAN BELANJA MODAL DALAM
LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA) PADA KANTOR
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
SUMATERA UTARA**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
Program Studi Akuntansi*



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Oleh

**NAMA : PENI INDAH SASTRI
NPM : 1505170636
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI dan BISNIS

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301
Website: <http://www.umsu.ac.id> Email: rektor@umsu.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI



Skrripsi ini disusun oleh :

NAMA : PENI INDAH SASTRI
NPM : 1505170636
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
KONSENTRASI : AKUNTANSI KEUANGAN
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS KINERJA ANGGARAN BELANJA MODAL
DALAM LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)
PADA KANTOR DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH SUMATERA UTARA

Disetujui dan telah memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian Mempertahankan
Skrripsi

Medan, Maret 2019

Pembimbing Skripsi

SEPRIDA HANUM HRP, SE, SS, M.Si

Diketahui/Disetujui

Oleh :

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis

FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si

Dekan
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis

H. JANURI, SE, M.M, M.Si

SURAT PERNYATAAN PENELITIAN/SKRIPSI

Nama : PENI INDAH SASTRI
NPM : 1505170636
Konsentrasi : Akuntansi Keuangan
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Menyatakan Bahwa ,

1. Saya bersedia melakukan penelitian untuk penyusunan skripsi atas usaha saya sendiri , baik dalam hal penyusunan proposal penelitian, pengumpulan data penelitian, dan penyusunan laporan akhir penelitian/skripsi
2. Saya bersedia dikenakan sanksi untuk melakukan penelitian ulang apabila terbukti penelitian saya mengandung hal-hal sebagai berikut
 - Menjiplak /plagiat hasil karya penelitian orang lain
 - Merckayasa data angket, wawancara, obeservasi, atau dokumentasi.
3. Saya bersedia dituntut di depan pengadilan apabila saya terbukti menalsukan stempel, kop surat, atau identitas perusahaan lainnya.
4. Saya bersedia mengikuti sidang meja hijau secepat-cepatnya 3 bulan setelah tanggal dikeluarkannya surat "Penetapan Proyek Proposal / Makalah/Skripsi dan Penghunjukan Dosen Pembimbing " dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.

Demikianlah Pernyataan ini saat perbuat dengan kesadaran sendiri

Medan, Maret 2019

Pembuat Pernyataan



[Handwritten Signature]
PENI INDAH SASTRI

NB :

- Surat Pernyataan asli diserahkan kepada Program Studi Pada saat Pengajuan Judul.
- Foto Copy Surat pernyataan dilampirkan di proposal dan skripsi.

ABSTRAK

PENI INDAH SASTRI, NPM :1505170636. Analisis Kinerja Anggaran Belanja Modal Dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pada Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara. Skripsi, tahun 2019

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah kinerja anggaran belanja modal dilihat dari analisis varians belanja, analisis pertumbuhan belanja, analisis keserasian belanja dan efisiensi belanja.

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deskriptif, sedangkan teknik pengumpulan datanya menggunakan dokumentasi dan wawancara.

Hasil penelitian ini menunjukkan kinerja anggaran belanja modal dilihat dari analisis varians belanja pada tahun 2016 dan 2017 kinerjanya mengalami penurunan. Kinerja anggaran belanja modal dilihat dari analisis pertumbuhan belanja pertumbuhannya mengalami fluktuasi namun dikatakan baik karena pertumbuhannya pada tahun 2014, 2016 dan 2017 bernilai positif kecuali untuk tahun 2015. Kinerja anggaran belanja modal dilihat dari analisis keserasian belanja dikatakan belum mampu dalam menjalankan kegiatan untuk kebutuhan kegiatan pembangunannya dikarenakan persinya belum mampu mencapai porsi pada umumnya kecuali untuk tahun 2014. Kinerja anggaran belanja modal dilihat dari rasio efisiensi belanja sudah baik karena realisasi anggaran tidak ada yang melebihi anggaran dan ini menunjukkan kantor dewan perwakilan rakyat daerah sumatera utara telah melakukan penghematan atas anggaran.

Kata kunci: Kinerja Anggaran belanja, Laporan realisasi anggaran

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan Rahmad dan Karunia-Nya yang tiada tara kepada kita semua terutama kepada penulis, dan sholawat beriring salam disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Analisis Kinerja Anggaran Belanja Modal Dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pada Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara”**.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis telah banyak mendapat bantuan serta dukungan dari berbagai pihak dengan tulus dan ikhlas. Secara khusus dan teristimewa penulis mengucapkan rasa terimakasih kepada :

1. Kedua orang tua, Ayahanda tersayang SULIADI dan Ibunda tercinta MISNI yang telah memberikan segala kasih sayangnya kepada penulis berupa besarnya perhatian, pengorbanan, bimbingan serta do'a yang tulus terhadap penulis. Serta yang tersayang untuk adik-adik saya Bani Pleno dan Devo Mei Lana.
2. Bapak Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

3. Bapak H.Januri, SE., MM., M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Ade Gunawan SE., M.Si selaku Wakil Dekan I Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Dr. Hasrudy Tanjung., SE., M.Si selaku Wakil Dekan III Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Seprida Hanum Hrp, SE.,SS.,M.Si, selaku Dosen Pembimbing Skripsi Penulis.
7. Ibu Fitriani Saragih, SE., M.Si, selaku ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Ibu Zulia Hanum, SE., M.Si, selaku Sekertaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
9. Seluruh staff pengajar Akuntansi di fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
10. Dan tak lupa penulis persembahkan buat sahabat - sahabat saya Sri Arif Ksuma, Sri Hartinah, Ummi Khai Runnisa, Tri Marlina Naully, Indah Yuni Panjaitan, dan Nursahro Rangkuti yang selalu memberikan masukan dan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan hasil skripsi.

Akhir kata dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwa tugas skripsi ini masih jauh dari kata sempurna meskipun penulisan ini dilakukan dengan semaksimal mungkin, tentu masih banyak kekurangan baik isi maupun bahasanya karena keterbatasan kemampuan, pengetahuan, dan pengalaman penulis.

Untuk itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritikan yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi penulis dan rekan – rekan mahasiswa/I serta para pembaca sekalian.

Atas perhatiannya, penulis mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Medan,.....2019

Penulis

PENI INDAH SASTRI

1505170636

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	7
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Kajian Teoritis.....	9
1. Anggaran	9
a. Pengertian anggaran.....	9
b. Fungsi anggaran	15
2. Realisasi	17
a. Pengertian Relisasi	17
b. Laporan Realisasi Anggaran	17
c. Periode Ketepatan Realisasi Anggaran	19
d. Ketepatan Waktu Pelaporan.....	19

e. Manfaat Pelaporan Realisasi Anggaran	19
3. Belanja Modal	20
a. Pengertian Belanja Modal	20
b. Kriteria Belanja Modal	23
4. Pengertian Analisis Kinerja.....	23
a. Analisis Varians Anggaran Belanja	24
b. Analisis Pertumbuhan Belanja	26
c. Analisis Keserasian Belanja	26
d. Rasio Efisiensi Belanja	27
5. Kinerja.....	28
a. Pengertian Kinerja	28
b. Tujuan Pengukuran Kinerja.....	29
c. Manfaat Pengukuran Kinerja.....	30
B. Penelitian Terdahulu.	31
C. Kerangka Berfikir.....	32

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian	34
B. Defenisi Oerasioanal Variabel	34
C. Tempat dan Waktu Penelitian	35
D. Jenis dan Sumber Data	36
E. Teknik Pengumpulan Data.....	37
F. Teknik Analisis Data.....	38

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	39
1. Gambaran Umum Perusahaan	39
2. Deskriptif Data Penelitian	40
3. Analisis Data	41
a. Analisis Varians Belanja.....	41
b. Analisis Pertumbuhan Belanja.....	43
c. Analisis Keserasian Belanja	44
d. Rasio Efisiensi Belanja	46
B. Pembahasan.....	48

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	52
B. Saran.....	53

DAFTAR PUSTAKA	55
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel I.1 Data Belanja Modal	4
Tabel II.1 Penelitian Terdahulu.....	31
Tabel III.1 Waktu Penelitian	36
Tabel III.2 Kisi – Kisi Wawancara	37
Tabel IV.1 Data Belanja Modal	40
Tabel IV.2 Selisih Anggaran dan Realisasi Belanja Modal.....	42
Tabel IV.3 Pertumbuhan Belanja.....	44
Tabel IV.4 Analisis Keserasian Belanja Modal	46
Tabel IV.5 Rasio Efisiensi Belanja Modal	47

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar II.1 Kerangka Berpikir	33

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak dikeluarkannya peraturan tentang otonomi daerah yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, maka kekuasaan atau tanggung jawab yang dibebankan kepada pemerintah daerah untuk mengelola daerahnya secara maksimal menjadi lebih besar. Hal ini ditujukan supaya distribusi dan pemanfaatan sumber daya alam nasional dapat merata dan terciptanya keseimbangan keuangan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

Anggaran merupakan alat penting untuk perencanaan dan pengendalian jangka pendek yang efektif dalam organisasi. Suatu anggaran operasi biasanya meliputi waktu satu tahun dan menyatakan pendapatan dan beban yang direncanakan untuk tahun itu. Dengan anggaran manajemen dapat menentukan efektifitas dan efisiensi suatu operasi dengan membandingkan antara anggaran dengan hasil aktual (realisasi terkini) yang dicapai. Penyusunan anggaran dalam pembiayaan disuatu instansi pemerintah merupakan salah satu elemen yang penting dalam pengelolaan instansi tersebut dalam mencapai hasil yang maksimal. Penyusunan anggaran yang baik sebagai sistem perencanaan koordinasi dan pengendalian dalam instansi tersebut. Oleh karena itu suatu instansi pemerintah dituntut mempunyai pimpinan yang dapat bekerja dengan efektif dan efisien, maka perlu adanya alat bantu untuk melaksanakannya salah satu alat tersebut adalah anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Untuk menilai tingkat efektifitas dan efisiensi dari penggunaan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah tidak dapat langsung dinyatakan dalam bentuk baik atau tidaknya, karena penilaian kinerja yang ada pada pemerintahan tidaklah sama dengan penilaian kinerja pada perusahaan-perusahaan yang memperoleh laba dalam pelaksanaan teknisnya.

Satuan kerja perangkat daerah (SKPD) menyusun rencana kerja anggaran (RKA) SKPD yang berdasarkan pedoman penyusunan RKA-SKPD yang disampaikan oleh TAPD menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang secara garis besar meliputi penyusunan KUA-PPAS; penyusunan Raperda APBD; dan Penetapan APBD dalam tahap penyusunan Raperda APBD disusun RKA-SKPD yang didalamnya termuat penyusunan Rincian Anggaran Pendapatan dalam RKA SKPD 1, Penyusunan Penyusunan Anggaran Belanja Tidak Langsung dalam RKA SKPD 2.1, Penyusunan Rincian Anggaran Belanja Langsung (Program & Kegiatan) dalam RKA SKPD 2.2.1, Penyusunan Rincian Penerimaan Pembiayaan Daerah dalam RKA SKPD 3.2. Rencana kerja anggaran adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang memuat rencana pendapatan, belanja untuk masing-masing program dan kegiatan menurut fungsi untuk tahun yang direncanakan, dirinci sampai dengan obyek pendapatan, belanja pembiayaan serta perkiraan maju untuk tahun anggaran berikutnya.

Menurut PP No. 71 tahun 2010, belanja modal merupakan belanja pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum. Belanja

modal digunakan untuk memperoleh aset tetap pemerintah daerah seperti peralatan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya. Cara mendapatkan belanja modal dengan membeli melalui proses lelang atau tender.

Salah satu tugas penting dari pemerintahan daerah adalah menyediakan dan membangun infrastruktur publik melalui alokasi belanja modal pada APBD. Belanja modal merupakan belanja pemerintah daerah yang mempunyai pengaruh penting terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah dan akan memiliki daya ungkit dalam menggerakkan roda perekonomian daerah.

Sargih (2003) menyatakan bahwa pemanfaatan belanja hendaknya dialokasikan untuk hal-hal produktif, misalnya untuk melakukan aktifitas pembangunan. Sejalan dengan pendapat tersebut, stine (1994) menyatakan bahwa penerimaan pemerintah hendaknya lebih banyak untuk program program layanan publik. Kedua pendapat ini menunjukkan bahwa pengalokasian belanja untuk berbagai kepentingan publik merupakan hal yang sangat penting dalam mendorong perekonomian daerah.

Anggaran digunakan sebagai alat untuk merancang program kerja atau langkah langkah yang akan dilakukan agar setiap aktivitas dapat terarah terkontrol dengan baik. Menurut Adi dan Mardiasmo (2002) dalam jurnal Ardi (2017) mengatakan bahwa anggaran memiliki fungsi sebagai alat penilaian pekerjaan. Berikut ini adalah data Belanja Modal pada laopran realisasi anggaran DPRD Provinsi Sumatera Utara tahun 2014-2017.

Tabel 1.1
Data Belanja Modal
Pada Laporan Realisasi Anggaran DPRD Prov-SU
Tahun 2014-2017

No	Tahun	Anggaran	Realisasi
1.	2014	6.405.406.250	5.532.630.000
2.	2015	929.900.000	767.518.000
3.	2016	13.239.590.000	1.618.568.887
4.	2017	4.371.983.355	3.103.541.250

Sumber : Laporan keuangan DPRD SUMUT

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa perencanaan atas anggaran pada tahun 2014 s/d 2017 disetujui, sejak tahun 2014 sampai tahun 2017 realisasi anggaran belum pernah mencapai anggaran yang direncanakan dan pada tahun 2016 realisasi anggaran jauh dari anggaran yang direncanakan. Menurut Ardi (2017) hasil kinerja seseorang dapat dinilai berdasarkan pencapaian atas realisasi anggaran. Keadaan ini bisa mengakibatkan pelaksanaan belanja akan mengalami hambatan. Unit unit kerja pemerintah diharapkan dapat menghasilkan sejumlah biaya unit yang spesifik untuk unit kerjanya (Mardiasmo:2009 dalam skripsi Ardi).

Menurut Rudianto (2013:66) yang menyatakan bahwa sebagai bagian dari fungsi perencanaan adalah anggaran yang merupakan rencana yang diupayakan untuk direalisasikan.

Menurut Mardiasmo (2009:63) anggaran sektor publik digunakan untuk meyakinkan bahwa pemerintah mempunyai uang yang cukup untuk memenuhi kewajibannya. Selain itu, anggaran digunakan untuk memberikan informasi dan meyakinkan legislatif bahwa pemerintah bekerja secara efisien, tanpa ada korupsi, dan pemborosan.

Keterkaitan antara anggaran dan realisasi memberikan gambaran bagaimana sebuah instansi dapat dikatakan efektif atau tidak dalam pengambilan keputusan

penganggaran dan pembiayaan tata laksana kegiatan instansi selama satu tahun anggaran tersebut. Dengan alat ukur berupa analisis yang ada didasarkan pada penggambaran yang mendukung analisa kinerja anggaran belanja. Untuk mengetahui secara besarnya varians anggaran belanja dengan realisasinya yang bisa dinyatakan dalam bentuk nominal atau persentasenya berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) belanja yang disajikan terlihat sejauh mana keefektifan dan penerapan anggaran untuk aktifitas instansi selama satu taun anggaran tersebut.

Pengukuran kinerja anggaran ini dapat menggunakan Analisis Varians Belanja untuk mengetahui seberapa besar anggaran dan realisasi terwujud dalam suatu instansi dapat dilihat melalui seberapa jauh pemenuhan pada belanja kegiatan yang digunakan oleh instansi. Misalnya dengan melihat pertumbuhan masing masing belanja, apakah pertumbuhan tersebut rasional dan dapat dipertanggung jawabkan dengan baik atau tidak. Pengukuran kinerjanya dapat menggunakan analisis pertumbuhan belanja.

Pengukuran kinerja anggaran lainnya dapat dilihat dengan menggunakan Analisis Keserasian belanja yang bermanfaat dalam mengetahui keseimbangan antar belanja. Salah satunya adalah dengan menilai rasio belanja modal terhadap total belanja. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui keseimbangan antar belanja yang menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan dana nya pada belanja secara optimal. Analisis ini dapat diketahui porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk belanja modal pada kantor dewan perwakilan rakyat daerah Sumatera utara

Untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah berupa angka efisiensi ini tidak bersifat absolut, tetapi relatif. Pengukuran kinerja anggaran lainnya dapat dilihat dengan menggunakan Rasio Efisiensi Belanja. Pengukuran kinerja anggaran yang difungsikan untuk menunjukkan produktifitas belanja modal.

Berdasarkan uraian sebelumnya penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Kinerja Anggaran Belanja Modal Dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pada Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara.”**

B. Identifikasi Masalah

Adapun identifikasi masalah berdasarkan pada latar belakang masalah di atas adalah sebagai berikut :

1. Realisasi anggaran dari tahun 2014-2017 belum pernah mencapai anggaran yang direncanakan.
2. Anggaran belanja modal pada tahun 2016 yang direalisasikan jauh dari anggaran yang telah di rencanakan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kinerja anggaran belanja modal dilihat dari analisis varians belanja?
2. Bagaimanakah kinerja anggaran belanja modal dilihat dari analisis pertumbuhan belanja?

3. Bagaimanakah kinerja anggaran belanja modal dilihat dari keserasian belanja?
4. Bagaimana kinerja anggaran belanja modal dilihat dari rasio efisiensi belanja?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

- a) Untuk mengetahui Bagaimanakah kinerja anggaran belanja modal dilihat dari analisis varians belanja.
- b) Untuk mengetahui Bagaimanakah kinerja anggaran belanja modal dilihat dari analisis pertumbuhan belanja.
- c) Untuk mengetahui Bagaimanakah kinerja anggaran belanja modal dilihat dari keserasian belanja.
- d) Untuk mengetahui Bagaimanakah kinerja anggaran belanja modal dilihat dari rasio efisiensi belanja.

2. Manfaat Penelitian

a. Bagi Penulis

Untuk menambah dan memperluas wawasan penulis khususnya mengenai Analisis kinerja Anggaran Belanja Modal Dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara.

b. Bagi Sekretariat DPRD Prov-SU

Hasil Penelitian ini dapat dijadikan sebagai informasi dan tambahan referensi dalam menganalisis kinerja anggaran belanja modal dalam laporan realisasi anggaran (LRA) pada Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan bacaan atau referensi bagi penulis selanjutnya, khususnya mengenai analisis kinerja anggaran belanja modal dalam laporan realisasi anggaran (LRA) pada kantor dewan perwakilan rakyat daerah sumatera utara.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian Teoritis

1. Anggaran

a. Pengertian Anggaran

Anggaran adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Anggaran ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Tahun anggaran meliputi masa satu tahun, mulai dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Anggaran merupakan alat utama pemerintah untuk melaksanakan semua kewajiban, janji dan kebijakannya ke dalam rencana-rencana konkrit dan terintegrasi dalam hal tindakan apa yang akan diambil, hasil apa yang akan dicapai pada biaya berapa dan siapa yang akan membayar biaya-biaya tersebut.

Anggaran dianggap sistem yang otonom, karena mempunyai sasaran dan tahapan – tahapan yang kesemuanya memiliki tahapan pertanggungjawaban. Anggaran adalah rencana manajemen dengan anggapan bahwa penyusunan anggaran akan mengambil langkah – langkah positif untuk merealisasikan anggaran yang telah disusun. Tahap penganggaran menjadi sangat penting karena merupakan perencanaan awal dalam realisasi yang memfasilitasi tercapainya kegiatan pemerintahan yang apabila dalam anggaran tersebut tidak efektif dan tidak berorientasi pada kinerja akan dapat menggagalkan perencanaan yang telah disusun.

Menurut Indra Bastian (2010:191) berdasarkan national committee on governmental accounting standards board (GASB), definisi anggaran adalah “...rencana operasi keuangan yang mencakup estimasi pengeluaran yang diusulkan dan sumber pendapatan yang diharapkan untuk membiayainya dalam periode waktu tertentu”. Pengertian anggaran menurut Sri Rahayu dan Andry Rachman (2013:4) anggaran adalah “Anggaran merupakan alat perencanaan dan pengendalian.

Perencanaan adalah pandangan kedepan untuk melihat tindakan apa yang seharusnya dilakukan agar dapat mewujudkan tujuan tujuan tertentu, sedangkan pengendalian adalah melihat ke belakang, memutuskan apa yang sebenarnya telah terjadi dan membandingkan dengan hasil yang direncanakan sebelumnya”. Dalam sebuah Negara demokrasi, pemerintah mewakili kepentingan rakyat, uang yang dimiliki pemerintah adalah uang rakyat dan anggaran menunjukkan rencana pemerintah untuk membelanjakan uang rakyat tersebut.

Anggaran dianggap sistem yang otonom, karena mempunyai sasaran dan tahap-tahapan yang kesemuanya memiliki tahapan pertanggungjawaban. Anggaran adalah rencana manajemen dengan anggapan bahwa penyusun anggaran akan mengambil langkah-langkah positif untuk merealisasikan anggaran yang telah disusun. Tahap penganggaran menjadi sangat penting karena merupakan perencanaan awal dalam realisasi (*plan for action*) yang memfasilitasi tercapainya kegiatan pemerintahan yang apabila dalam anggaran tersebut tidak efektif dan tidak berorientasi pada kinerja akan dapat menggagalkan perencanaan yang telah disusun.

Menurut **(Mardiasmo:2009)** Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial, sedangkan penganggaran adalah proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran. Proses penyusunan anggaran sektor publik umumnya disesuaikan dengan peraturan lembaga yang lebih tinggi yang didasarkan pada Undang-undang nomor 133 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, sehingga lahirnya tiga paket perundang-undangan, yaitu Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-undang nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, yang telah membuat perubahan mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengaturan keuangan, khususnya Perencanaan dan Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Pusat.

Kemudian keluar peraturan baru yaitu Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri nomor 13 tahun 2006 (saat ini telah diubah dengan Permendagri nomor 59 tahun 2007) tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang akan menggantikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 tahun 2002.

Perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja merupakan suatu proses dalam meningkatkan manfaat sumber daya input untuk pencapaian hasil (*outcome*) dan keluaran (*output*) melalui *key performance indicators* (KPI) yang terkait dengan 3 (tiga) hal, yaitu pengukuran kinerja, pengukuran biaya untuk menghasilkan penggunaan informasi kinerja *outcome* dan *output* serta penilaian keefektifan dan efisiensi belanja dengan berbagai alat analisis. Dengan tujuan

alokasi dana yang digunakan untuk membiayai berbagai program dan kegiatan dapat memberikan manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat dan pelayanan yang berorientasi pada kepentingan publik. (Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005).Berikut dapat dijadikan bahan penilaian pada kinerja anggaran.

Menurut (**Mulyadi:2001**) ada beberapa karakteristik anggaran antara lain:

1. Anggaran dinyatakan dalam satuan keuangan dan satuan keuangan lainnya.
2. Umumnya mencakup jangka waktu 1 tahun.
3. Berisi komitmen atau kesanggupan manajemen, yang berarti bahwa manajer setuju untuk menerima tanggung jawab untuk mencapai sasaran yang ditetapkan anggaran.
4. Usulan anggaran di *review* dan disetujui oleh pihak yang berwenang lebih tinggi dari penyusunan anggaran.
5. Sekali disetujui, anggaran hanya dapat diubah dibawah kondisi tertentu.
6. Secara berkala, kinerja keuangan sesungguhnya dibandingkan dengan anggaran dan selisihnya dianalisis dan dijelaskan.

Dari karakteristik diatas dapat diketahui bahwa anggaran menjadi alat yang penting bagi manajemen dalam melaksanakan tugasnya. Sebagai alat untuk membantu pencapaian tujuan, anggaran dapat diandalkan karena dibuat berdasarkan analisa data-data tahun yang lalu dan proyeksi tahun yang akan datang.

Karakteristik anggaran yang baik menurut **(Dwi Mariani:2006)**:

1. Anggaran disusun berdasarkan program.
2. Anggaran disusun berdasarkan karakteristik pusat pertanggung jawaban yang dibentuk dalam organisasi.
3. Anggaran berfungsi sebagai alat perencanaan dan pengendalian.

Pembelajaran Anggaran berbasis kinerja pada dasarnya merupakan sistem penyusunan dan pengelolaan anggaran yang berorientasi pada pencapaian hasil kerja atau *outcome* dari pengalokasian biaya yang didasarkan pada kegiatan atau program kerja yang akan dilaksanakan. Dalam implementasinya, anggaran berbasis kinerja juga menekankan pada penggunaan dana yang dialokasikan secara ekonomis, efektif dan efisien. Dengan kata lain anggaran berbasis kinerja merupakan sistem penganggaran yang mengkaitkan alokasi anggaran yang diklasifikasikan berdasarkan kegiatan atau program kerja dengan hasil kerja.

Dengan demikian struktur anggaran yang disusun dengan pendekatan kinerja merupakan satu kesatuan yang terdiri dari pendapatan dan pembiayaan yang dirinci menurut kegiatan atau program kerja yang akan dilaksanakan setiap unit kerja dan jenis belanja. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam periode tahun anggaran tertentu, sementara belanja adalah semua pengeluaran dalam periode tahun anggaran yang sama. Sedangkan pembiayaan adalah transaksi keuangan dalam bentuk pengeluaran pendapatan untuk kegiatan belanja. Pengembangan indikator keberhasilan menggunakan kriteria :

1. Relevan, secara logis dan langsung berhubungan dengan tujuan dan sasaran unit kerja, program atau kegiatan.
2. Mudah dipahami, dapat di komunikasikan dengan jelas.

3. Konsisten, digunakan secara seragam dalam perencanaan, penganggaran, sistem akuntansi dan pelaporan.
4. Dapat dibandingkan, dapat menunjukkan perkembangan dan perbedaan kinerja dari program atau kegiatan yang sejenis.
5. Andal (*reliable*) diperoleh dari sistem data yang terkendali dan dapat diverifikasi.

Beberapa hambatan dapat diketahui dengan :

1. Realisasi penyerapan belanja daerah termasuk belanja modal dipengaruhi oleh bagaimana pola perencanaan dan penganggaran di daerah, mekanisme transfer dan pelaksanaan program/kegiatan di daerah.
2. Dalam proses perencanaan anggaran di daerah, permasalahan yang sering dihadapi adalah adanya perbedaan program-program prioritas antara pihak eksekutif dengan DPRD dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD antara pemerintah daerah dengan legislatif.
3. Realisasi belanja modal di daerah pada akhir tahun anggaran seringkali masih di bawah target atau lebih rendah dibandingkan dengan anggarannya.

Hal ini ditengarai karena beberapa hal yaitu:

- a. Terkadang peraturan daerah mempunyai kecenderungan untuk melakukan perubahan APBD sekitar bulan Agustus-September tahun anggaran berjalan, setelah diketahuinya hasil audit atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun sebelumnya

sehingga dapat mengetahui secara pasti berapa besarnya Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya.

- b. Adanya pelampauan pendapatan, besarnya angka SiLPA dan penetapan perubahan APBD menjelang akhir tahun anggaran berjalan mengakibatkan waktu yang tersisa untuk menyesuaikan belanja dan merealisasikannya terbatas sehingga menyebabkan rendahnya penyerapan dan rendahnya kualitas penyelesaian kegiatan.

Dari beberapa definisi diatas dapat penulis simpulkan bahwa anggaran merupakan rencana operasi keuangan suatu organisasi yang diwujudkan dalam bentuk finansial dan di susun secara sistematis untuk periode waktu tertentu yang mencakup estimasi pengeluaran yang di usulkan dan sumber pendapatan yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran tersebut.

b. Fungsi Anggaran

Bagi organisasi sektor publik seperti Pemerintah, Anggaran tidak hanya sebuah rencana tahunan tetapi juga merupakan bentuk akuntabilitas atas pengelolaan dana publik yang dibebankan kepadanya. Mardiasmo (2009;63) menguraikan fungsi utama anggaran sektor publik sebagai berikut:

- 1) Alat Perencanaan (*planning tool*)
- 2) Alat Pengendalian (*control tool*)
- 3) Kebijakan Fiscal (*fiscal tool*)
- 4) Alat Politik (*politcal tool*)
- 5) Alat koordinasi dan komunikasi (*coordinatin and communication tool*)
- 6) Alat Penilaian Kinerja (*performance measurement tool*)
- 7) Alat motivasi (*motivation tool*)
- 8) Alat menciptakan ruang publik (*public sphere*)

Berdasarkan uraian di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Anggaran sebagai Alat Perencanaan (*Planning Tool*). Dengan adanya anggaran, organisasi tahu apa yang harus dilakukan dan ke arah mana kebijakan yang dibuat.
- 2) Anggaran sebagai Alat Pengendalian (*Control Tool*). Dengan adanya anggaran organisasi sektor publik dapat menghindari adanya pengeluaran yang terlalu besar (*overspending*) atau adanya penggunaan dana yang tidak semestinya (*misspending*).
- 3) Anggaran sebagai Alat Kebijakan Fiskal (*Fiscal Tool*). Melalui anggaran dapat diketahui arah kebijakan fiskal Pemerintah, sehingga dapat digunakan untuk mendorong, memfasilitasi, dan mengkoordinasikan kegiatan ekonomi masyarakat, sehingga dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi.
- 4) Anggaran sebagai Alat Politik (*Political Tool*). Dalam organisasi sektor public, melalui anggaran dapat dilihat komitmen pengelola dalam melaksanakan program-program yang telah dijanjikan.
- 5) Anggaran sebagai Alat Koordinasi dan Komunikasi (*Coordination and Communication Tool*). Melalui dokumen anggaran yang komprehensif sebuah bagian atau unit kerja atau departemen yang merupakan sub organisasi dapat mengetahui apa yang harus dilakukan dan juga apa yang akan dilakukan oleh bagian atau unit kerja lainnya.
- 6) Anggaran sebagai Alat Penilaian Kinerja (*Performance Measurement Tool*). Anggaran adalah suatu ukuran yang bias menjadi patokan apakah

suatu bagian/unit kerja telah memenuhi target baik berupa terlaksananya aktivitas maupun terpenuhinya efisiensi biaya.

7) Anggaran sebagai Alat Motivasi (*Motivation Tool*). Anggaran dapat digunakan sebagai alat motivasi dengan menjadikan nilai-nilai nominal yang tercantum sebagai target pencapaian.

8) Anggaran sebagai Alat untuk Menciptakan Ruang Publik (*Public Sphere*). Masyarakat, LSM, Perguruan Tinggi, dan berbagai organisasi kemasyarakatan harus terlibat dalam proses penganggaran publik.

2. Realisasi

a. Pengertian Realisasi Anggaran

Menurut Gege Edy Prasetya dalam bukunya yang berjudul *Penyusunan dan Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah* menjelaskan

“Realisasi Anggaran adalah laporan yang menggambarkan perbandingan antara anggaran pendapatan dan belanja dengan realisasinya yang menunjukkan ketaatan terhadap peraturan dan ketentuan perundang-undangan”

b. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola Pemerintahan Pusat/Daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menungkapkan kegiatan keuangan Pemerintah Pusat/Daerah yang menunjukkan jabatan terhadap APBD. Unsur-unsur yang mencakup secara langsung dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menurut standar Akuntansi Pemerintah Pusat dan Daerah (KSAP) yang mencakup komite yang dibentuk oleh Departemen

Keuangan RI yaitu untuk memecahkan berbagai kebutuhan yang muncul dalam pelaporan keuangan, akuntansi, dan audit di Pemerintahan (2009;21).terdiri dari:

- 1) Pendapatan (Basis Kas) adalah Hak penerimaan oleh Bendaharawan Umum Negara/Bendahara Umum Daerah atau entitas Pemerintah lainnya yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan menjadi hak Pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah.
- 2) Pendapatan (Basis Akrual) adalah hak Pemerintah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih.
- 3) Belanja (Basis Kas) adalah Semua pengeluaran oleh Bendaharawan Umum Negara/Bendahara Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak diperoleh pembayarannya kembali ke Pemerintah.
- 4) Belanja (Basis Akrual) adalah Kewajiban Pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
- 5) Transfer adalah Penerimaan/Pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
- 6) Pembiayaan (*financing*) adalah Setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran. Pemerintahan terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

- 7) Penerimaan pembayaran antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil investasi. Pengeluaran penerimaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh Pemerintah.

c. Periode Ketepatan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Selain itu Laporan Realisasi Anggaran ini juga disajikan 2 kali setahun, yaitu laporan semesteran dan laporan tahunan. Dalam situasi tertentu, tanggal laporan suatu entitas berubah dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) tahunan disajikan dengan satu periode yang berubah lebih panjang atau pendek dari satu tahun, entitas mengungkapkan informasi sebagai berikut:

- 1) Anggaran alasan penggunaan periode pelaporan tidak satu tahun.
- 2) Fakta bahwa jumlah-jumlah komparatif dalam Laporan Realisasi Anggaran dalam catatan-catatan terkait tidak dapat diperbandingkan.

d. Ketepatan Waktu Pelaporan

Ketepatan waktu merupakan hal yang harus diperhatikan sekali dalam pelaporan keuangan, karena dapat mengefisiensi waktu pengambilan keputusan berdasarkan hasil pelaporan keuangan, semesteran atau laporankeuangantahunan.

e. Manfaat Pelaporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan dari suatu

entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas, dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran.

Disamping hal diatas, Laporan Realisasi Anggaran (LRA) juga menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk menandai kegiatan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) juga dapat menyediakan informasi kepada para pengguna laporan indikasi tentang perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi.

3. Belanja Modal

a. Pengertian Belanja Modal

Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010, belanja modal merupakan belanja pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi 1 tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum. Belanja modal digunakan untuk memperoleh aset tetap pemerintah daerah seperti peralatan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya. Cara mendapatkan belanja modal dengan membeli melalui proses lelang atau tender.

Halim (2008:73) mendefinisikan Belanja Modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap/inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi,

termasuk di dalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas aset. Tidak jauh berbeda dengan yang diungkapkan Abdullah (2013), Belanja modal adalah komponen belanja langsung dalam anggaran pemerintah yang menghasilkan output berupa aset tetap. Sama pula dengan yang diungkapkan oleh Nordiawan (2006), bahwa Belanja Modal adalah belanja yang dilakukan pemerintah yang menghasilkan aktiva tetap tertentu.

Adapun jenis - jenis belanja yang dapat dikategorikan kedalam lima kategori utama kegiatan belanja modal menurut Syaiful (2006), Menurut Perdirjen Perbendaharaan belanja modal dipergunakan untuk antara lain sebagai berikut :

- 1) Belanja Modal Tanah. Belanja modal tanah adalah pengeluaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan atau pembelian atau pembebasan penyelesaian, balik nama dan sewa tanah, pengosongan, pengurangan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat dan pengeluaran lainnya sehubungan dengan perolehan hak atas tanah dan sampai bangunan dimaksud dalam kondisi siap pakai.
- 2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin. Belanja modal peralatan dan mesin adalah pengeluaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan atau penambahan atau penggantian, dan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin serta inventaris kantor yang memberikan manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan sampai peralatan dan mesin dimaksud dalam kondisi siap pakai.
- 3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan Belanja modal gedung dan bangunan adalah pengeluaran atau biaya yang digunakan untuk

pengadaan atau penambahan, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan yang menambah kapasitas sampai gedung dan bangunan dimaksud dalam kondisi siap pakai.

4) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan adalah pengeluaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan atau penambahan atau penggantian atau peningkatan pembangunan atau pembuatan serta perawatan, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan jalan irigasi dan jaringan yang menambah kapasitas sampai jalan irigasi dan jaringan dimaksud dalam kondisi siap pakai.

5) Belanja Modal Fisik Lainnya Belanja modal fisik lainnya adalah pengeluaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan atau penambahan atau penggantian atau peningkatan pembangunan atau pembuatan serta perawatan terhadap fisik lainnya yang tidak dapat dikategorikan kedalam kriteria belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan jalan irigasi dan jaringan, termasuk dalam belanja ini adalah belanja modal kontrak sewa beli, pembelian barang- barang kesenian, barang purbakala dan barang untuk museum, hewan ternak dan tanaman, buku- buku dan jurnal ilmiah.

b. Kriteria Belanja Modal

Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Untuk mengetahui apakah suatu belanja dapat dimasukkan sebagai Belanja Modal atau tidak, maka perlu diketahui definisi aset tetap atau aset lainnya dan kriteria kapitalisasi aset tetap sebagai berikut:

- 1) Aset tetap mempunyai ciri-ciri / karakteristik sebagai berikut :
berwujud, akan menambah aset pemerintah, mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun, nilainya relatif material.
- 2) Sedangkan ciri-ciri / karakteristik Aset Lainnya adalah : tidak berwujud.
- 3) Penambah aset pemerintah, mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun, nilainya relatif material.

4. Pengertian Analisis Kinerja

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Analisis adalah Penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya); Penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antarbagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan; Penyelidikan kimia dengan menguraikan sesuatu untuk mengetahui zat bagiannya dan sebagainya, penjabaran sesudah dikaji sebaik-baiknya; pemecahan persoalan yang dimulai dengan dugaan akan kebenarannya.

Anggaran adalah perencanaan keuangan untuk masa depan yang pada umumnya mencakup jangka waktu satu tahun dan dinyatakan dalam satuan moneter. Anggaran ini merupakan perencanaan jangka pendek organisasi yang menterjemahkan berbagai program ke dalam rencana keuangan tahunan yang lebih konkret. Usulan anggaran pada umumnya telah lebih terlebih dahulu di telaah oleh pejabat yang lebih tinggi untuk bisa dijadikan anggaran formal. Penyusunan anggaran pada organisasi sektor publik dapat membantu mewujudkan akuntabilitas. Berdasarkan anggaran yang telah ditetapkan, masyarakat secara tidak langsung dapat melakukan pengawasan atau pengendalian.(Mahsun:2012).

Menurut (Mahsun:2006), Analisis selisih anggaran adalah teknik pengukuran kinerja tradisional yang membandingkan antara anggaran dengan realisasi tanpa melihat keberhasilan program pengukuran kinerja ditekankan pada input, yaitu jika terjadinya overspending dan underspending. Analisis prestasi dalam hal ini adalah kinerja keuangan dari pemerintahan daerah itu sendiri yang dapat didasarkan pada kemandirian dan kemampuannya untuk memperoleh, memiliki, memelihara dan memanfaatkan keterbatasan sumber-sumber ekonomis daerah untuk pemenuhan seluas-luasnya kebutuhan masyarakat di daerah.

a. Analisis Varians Belanja.

Analisis varians anggaran belanja dilakukan dengan cara menghitungselisih antara realisasi belanja dengan yang dianggarkan. Dalam analisis selisih anggaran belanja, hal utama yang perlu dilakukan oleh pembaca laporan adalah:

Melihat besarnya selisih anggaran belanja dengan realisasinya baik secara nominal maupun persentase.

- 1) Menetapkan tingkat selisih yang dapat ditoleransi atau dianggap wajar.
- 2) Menilai signifikan tidaknya selisih tersebut jika dilihat dari total belanja.
- 3) Menganalisis penyebab terjadinya selisih anggaran belanja.

Analisis varians merupakan analisis terhadap perbedaan atau selisih antara realisasi belanja dengan anggaran. Analisis varians cukup sederhana namun dapat memberikan informasi yang sangat berarti.

Hal penting yang harus diperhatikan dalam analisis varians ini adalah :

- a. Apakah selisih tersebut dapat dipertanggung jawabkan dan berapa tingkat selisih yang kita ketahui?
- b. Berapa besarnya varians, apakah jumlahnya signifikan atau tidak ?

Pemerintah daerah dikatakan memiliki kinerja belanja yang baik apabila mampu merealisasikan belanja yang sesuai jumlah yang dianggarkan. Sebaliknya apabila realisasi belanja melebihi ataupun jauh dibawah jumlah yang dianggarkan, maka hal itu dinilai kurang baik. Menurut Suryani Fajrin (2018) semakin kecil selisih antara anggaran dan realisasi belanja maka pemerintah pada umumnya telah memanfaatkan APBD khususnya belanja daerah dengan baik.

Menurut (Mahmudi, 2010:157) analisis varians belanja dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Analisis Varians Belanja} = \text{Anggaran Belanja} - \text{Realisasi Belanja} \text{ belanja Belanja}$$

b. Analisis Pertumbuhan Belanja

Pengukuran kinerja anggaran juga dapat dilihat dengan menggunakan analisis pertumbuhan belanja yang bermanfaat untuk mengetahui pertumbuhan belanja dari tahun ke tahun positif atau negatif. Menurut Mahmudi (2010:142) analisis pertumbuhan belanja bermanfaat untuk mengetahui perkembangan belanja dari tahun ke tahun. Pada umumnya belanja memiliki kecenderungan untuk selalu naik. Alasan kenaikan belanja biasanya dikaitkan dengan penyesuaian terhadap inflasi, perubahan kurs rupiah, perubahan jumlah cakupan layanan, dan penyesuaian faktor makro ekonomi.

Menurut (Mahmudi, 2010:160) pengukuran kinerjanya sebagai berikut :

$$\frac{\text{Realisasi Belanja Thn } t - \text{Realisasi Belanja Thn } t - 1}{\text{Realisasi Belanja Tahun } t - 1} \times 100\%$$

c. Analisis Keserasian Belanja

Pengukuran kinerja anggaran lainnya dapat dilihat dengan menggunakan analisis keserasian belanja yang menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan dananya pada belanja secara optimal. Berdasarkan rasio ini, pembaca laporan dapat mengetahui porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk investasi dengan bentuk belanja modal pada tahun anggaran bersangkutan. Belanja modal memberi manfaat jangka menengah dan panjang juga bersifat rutin.

Belum ada patokan yang pasti berapa besarnya Rasio belanja modal terhadap APBD yang ideal, karena sangat dipengaruhi oleh dinamisasi kegiatan pembangunan dan besarnya kebutuhan investasi yang diperlukan untuk mencapai pertumbuhan yang ditargetkan.

Menurut (Mahmudi, 2010:160) pengukuran kinerjanya sebagai berikut :

$$\text{Belanja Modal} = \frac{\text{total belanja modal}}{\text{total belanja}} \times 100\%$$

d. Rasio efisiensi belanja

Rasio efisiensi belanja merupakan perbandingan antara realisasi belanja dengan anggaran belanja. Rasio efisiensi belanja ini di gunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah, berupa angka efisiensi ini tidak bersifat absolut, tetapi relatif. Artinya tidak ada standar baku yang dianggap baik untuk rasio ini. Kita hanya dapat mengatakan bahwa tahun ini belanja pemerintah daerah relatif lebih efisien dibandingkan tahun lalu. Menurut Mahmudi (2010) jika angka yang dihasilkan dari rasio kurang dari 100% maka dinilai telah melakukan efisiensi belanja.

Menurut Mahmudi (2010 : 166) pengukuran kinerjanya sebagai berikut:

$$\frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

a. Kinerja

a. Pengertian Kinerja

Kinerja dapat diartikan sebagai aktivitas terukur dari suatu entitas selama periode tertentu sebagai bagian dari ukuran keberhasilan pekerjaan. Menurut (Halim:2004) “Kinerja keuangan daerah adalah : “Merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah”.

Menurut (Bastian:2006) “Kinerja adalah:

“Gambaran pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/ program/ kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi. Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan”.

Indikator kinerja mengacu pada penilaian kinerja secara tidak langsung, yaitu hal-hal yang sifatnya hanya merupakan indikasi-indikasi kinerja. Untuk dapat mengukur kinerja pemerintah, maka perlu indikator-indikatornya sebagai berikut:

- a) Sistem perencanaan dan pengendalian
- b) Spesifikasi teknis dan standarisasi
- c) Kompetensi teknis dan profesionalisme
- d) Mekanisme ekonomi dan mekanisme pasar
- e) Mekanisme sumber daya manusia

Sedangkan peran indikator kinerja bagi pemerintah antara lain :

- 1) Untuk membantu memperjelas tujuan organisasi
- 2) Untuk mengevaluasi target akhir (*final outcome*) yang dihasilkan
- 3) Sebagai masukan untuk menentukan skema insentif manajerial

- 4) Memungkinkan pemakai jasa layanan pemerintah untuk melakukan pilihan
- 5) Untuk menunjukkan standar kinerja
- 6) Untuk menunjukkan efektivitas
- 7) Untuk membantu menentukan aktivitas yang memiliki efektivitas biaya yang paling baik untuk mencapai target sasaran, dan
- 8) Untuk menunjukkan wilayah, bagian, atau proses yang masih potensial untuk dilakukan penghematan biaya.

b. Tujuan Pengukuran Kinerja

Tujuan pokok pengukuran kinerja adalah untuk memotivasi karyawan dalam mencapai tujuan organisasi dan dalam memenuhi standar perilaku yang telah ditetapkan sebelumnya agar dapat mencapai hasil yang diinginkan. Secara umum, tujuan pengukuran kinerja adalah:

- a. Untuk mengkomunikasikan strategi secara lebih baik.
- b. Untuk mengukur kinerja finansial dan non finansial secara tertimbang sehingga dapat ditelusuri perkembangan pencapaian strateginya.
- c. Sebagai alat untuk mencapai kepuasan berdasarkan individual dan kemampuan kolektif yang rasional.

Pada dasarnya pengukuran kinerja sektor publik dilakukan untuk memenuhi tiga tujuan yaitu:

- 1) Untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah.
- 2) Untuk pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan.

- 3) Untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.

c. Manfaat Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja mempunyai manfaat yang banyak bagi organisasi, secara umum manfaat pengukuran kinerja adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan pemahaman mengenai ukuran yang digunakan menilai kinerja manajemen.
- b. Menunjukkan arah pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.
- c. Memonitor dan mengevaluasi kinerja dengan membandingkan skema kerja dan pelaksanaannya.
- d. Membantu mengungkap dan memecahkan masalah yang ada.
- e. Membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah.
- f. Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara objektif.

B. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian yang sebelumnya telah dilakukan sehubungan dengan topik penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut:

Tabel II.1
Penelitian Terdahulu

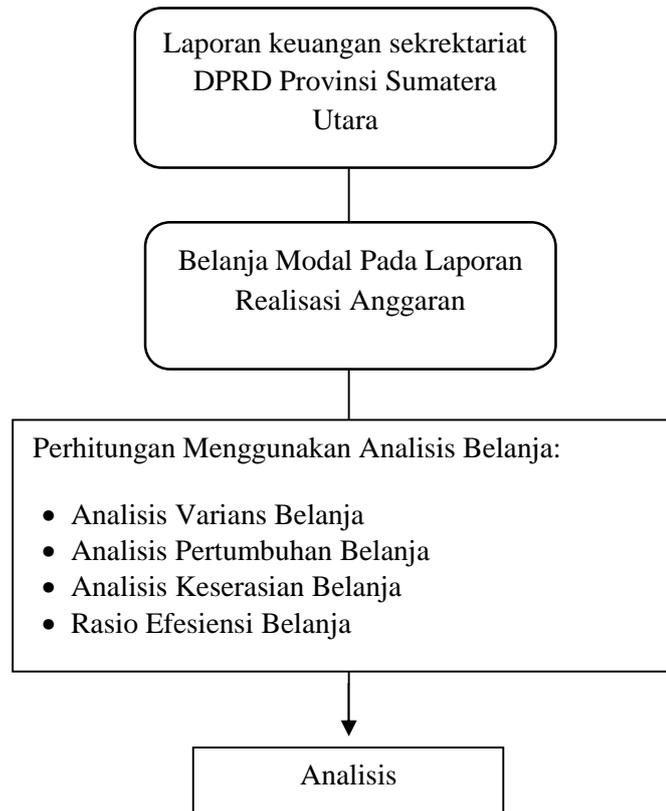
No	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Rani Febri ramadhani, dkk (2016)	Analisis kinerja anggaran dan realisasi pendapatan daerah pemerintah kota samarinda.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa: kinerja keuangan pendapatan kota samarinda dikatakan sangat baik, hal ini di buktikan dengan rata-rata 1,17%, pertumbuhan pendapatan rata rata positif, dan rasio efektifitas rata rata 100%.
2.	Gres Yunita Liando (2016)	Analisis kinerja belanja dalam laporan realisasi anggaran (LRA) pada dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan asetn daerah kabupaten kepulauan sangihe daerah.	Hasil penelitian ini adalah belanja pada LRA untuk tahun 2011-2014 menunjukkan bahwa kinerja belanja Pemkab kepulauan sangihe dinilai baik dan terus melakukan perbaikan setiap tahun dalam pemanfaatan realisasi belanja. Pertumbuhan belanja mulai terlihat pada tahun selanjutnya PemKab Kepulauan Sangihe sebaiknya mengalokasikan belanja daerah dalam porsi yang seimbang sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat serta Pimpinan DPPKAD sebaiknya meninjau lebih jauh manfaat serta pengalokasian belanja daerah sehingga dapat meningkatkan efektivitas, produktivitas dan efisiensi belanja di masa yang akan datang.
3.	Sakina Tantri (2018)	Analisis Kinerja Anggaran Belanja Pada Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 – 2016	hasil penelitian dapat diketahui bahwa: (1) hasil analisis varians belanja dan analisis pertumbuhan belanja di Dinas Kebudayaan Daerah istimewa Yogyakarta sudah berjalan dengan baik; (2) analisis keserasian belanja menunjukkan bahwa dinas sudah melakukan harmonisasi belanja daerah; (3) Dinas Kebudayaan Daerah istimewa Yogyakarta sudah melakukan efisiensi dengan menggunakan anggaran tidak melebihi realisasinya. Namun, terdapat salah satu

			program yang tidak berjalan secara efisien dan untuk hasil perhitungan dari rasio efektivitas dinas terkait dinilai sudah efektif dalam menggunakan anggaran belanja tidak langsung. Secara keseluruhan, kinerja anggaran belanja Dinas Kebudayaan Daerah istimewa Yogyakarta tahun 2012-2016 baik.
4.	Ayu Wandira (2015)	Analisis kinerja anggaran Belanja pada badan perencanaan pembangunan daerah .	Hasil penelitian ini Dari Analisis Varians Belanja pada tahun 2008 adalah 89,12%, tahun 2009 adalah 48,13%, tahun 2010 adalah 76,54%, tahun 2011 adalah 69,67% dan tahun 2012 adalah 62,44%. Dari Analisis Pertumbuhan belanja pada tahun 2008-2009 adalah 49,5%, pada tahun 2009-2010 adalah 19,93%, pada tahun 2010-2011 adalah 34,04% dan pada tahun 2011-2012 adalah 5,95. Dari Analisis Keserasian Belanja serta Analisis Efektivitas dan Efisiensi diharapkan agar semakin meningkatkan kinerja dalam pengelola anggaran belanja daerah. Dengan kinerja yang baik maka efektivitas, produktivitas dan efisiensi belanja juga akan semakin baik. Dalam hal efisiensi belanja Bappeda agar lebih mantap dalam meningkatkan pertumbuhan optimal anggaran belanja yang wajar dari tahun sekarang sampai seterusnya.

C. Kerangka Berfikir

Laporan keuangan merupakan suatu informasi keuangan dari sebuah entitas pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Penulis menggunakan data pada laporan keuangan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara untuk mengukur tingkat kinerja anggaran belanja dilihat dari analisis varians belanja, analisis pertumbuhan, keserasian belanja dan rasio efisiensi belanja.

Untuk memberikan gambaran yang jelas sehubungan dengan kerangka pemikiran pada penelitian ini, akan di sajikan gambaran kerangka pemikiran penelitian ini adalah sebagai berikut :



Gambar II.1
Kerangka Berfikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pelitan yang dilakukan oleh penulis merupakan jenis penelitian deskriptif, yaitu menjelaskan karakteristik suatu fenomena yang dapat digunakan sebagai dasar pembuatan keputusan untuk memecahkan masalah masalah bisnis. Jenis pendekatan deskriptif ini bertujuan untuk menggambarkan sifat sesuatu yang sedang berlangsung pada saat penelitian dilakukan dan memeriksa sebab sebab dari suatu fenomena yang terjadi dalam keadaan nyata pada waktu penelitian dilakukan.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan penelitian *Deskriptif* yang merupakan suatu metode dimana data dikumpulkan, disusun, diinterpretasikan dan di analisa agar memberikan gambaran mengenai suatu keadaan tertentu sehingga dapat ditarik kesimpulan.

B. Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional merupakan acuan dari landasan teoritis yang digunakan untuk melakukan penelitian dimana anatar variabel yang satu dengan yang lainnya dapat dihubungkan sehingga penelitian dapat disesuaikan dengan kata yang diinginkan. Adapun yang menjadi definisi operasionalnya adalah Kinerja dapat diartikan sebagai aktivitas terukur dari suatu entitas selama periode tertentu sebagai bagian dari ukuran keberhasilan pekerjaan. Menurut

(Bastian:2006) “Kinerja adalah Gambaran pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/ program/ kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi. Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan”.

Belanja modal Halim (2008:73) mendefinisikan Belanja Modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap/inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk di dalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas aset.

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah, analisis varians belanja, analisis pertumbuhan belanja, analisis keserasian belanja dan rasio efisiensi belanja.

C. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian dilakukan pada Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara Jl. Imam Bonjol No 5 Petisah Tengah Medan Petisah.

2. Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian ini direncanakan mulai pada bulan November 2018 sampai dengan Maret 2019.

Tabel III.1
Waktu Penelitian

No	Kegiatan Penelitian	Waktu Penelitian																	
		November 2018				Desember 2018				Januari 2019				Februari 2019				Maret 2019	
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2
1	Pengajuan judul	■																	
2	Riset awal		■																
3	Pembuatan proposal			■	■	■	■												
4	Bimbingan Proposal					■	■	■	■	■	■								
5	Seminar Proposal											■							
6	Riset												■						
7	Penyusunan Skripsi													■	■	■			
8	Bimbingan Skripsi																■	■	
9	Sidang Meja Hijau																		■

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah Data kuantitatif. Pendekatan kuantitatif merupakan data yang dinyatakan dalam bentuk angka. Dalam penelitian ini data kuantitatifnya berupa Laporan Target dan Realisasi belanja modal.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan adalah :

- a. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, baik berupa publikasi maupun data perusahaan sendiri, antara lain data mengenai sejarah ringkas, struktur organisasi, catatan

dan sumber-sumber kepustakaan. Data ini berupa Laporan Realisasi anggaran belanja modal.

- b. Data primer merupakan data yang diperoleh dengan cara melakukan penelitian langsung ditempat penelitian, guna mencari informasi sebagai data pendukung untuk penelitian. Data ini berupa hasil wawancara dengan pegawai di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Sumatera Utara.

E. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah Teknik :

1. Dokumentasi yaitu jenis data yang digunakan data sekunder yang diperoleh secara tidak langsung ataupun langsung berupa bukti, catatan, atau laporan historis yang telah tersusun yang dipublikasikan.
2. Wawancara (interview) yaitu, melakukan tanya jawab dengan pihak yang berwenang yaitu pada pegawai tetap kantor dewan perwakilan rakyat daerah sumatera utara.

Tabel III.2
Kisi-kisi Wawancara

No	Pertanyaan	No item
1.	Laporan Realisasi Anggaran	
	1. Bagian LRA	1,2
2.	Kinerja anggaran Belanja modal	
	1. Realisasi Anggaran	3
	2. Dampak Belanja Modal	4,7
	3. Faktor Belanja Modal	5,6
	4. Kriteria porsi belanja modal	8,9,10

F. Teknik Analisis Data

1. Analisis Varians Belanja

Untuk melihat apakah pemerintah pada umumnya telah memanfaatkan APBD khususnya anggaran belanja modal dengan baik. Varians belanja diukur dengan menggunakan selisih antara realisasi belanja dengan belanja yang dianggarkan yaitu:

$$\text{Varians belanja} = \text{Realisasi Belanja} - \text{Anggaran Belanja}$$

2. Analisis Keserasian Belanja

Merupakan perbandingan antara total belanja modal dengan total belanja.

$$\frac{\text{Total belanja modal}}{\text{total belanja}} \times 100\%$$

3. Analisis Pertumbuhan Belanja

Analisis pertumbuhan belanja berfungsi untuk mengetahui perkembangan belanja dari tahun ke tahun. Pertumbuhan belanja daerah dapat dihitung dengan rumus berikut :

$$\frac{\text{Realisasi Belanja Thn } t - \text{Realisasi Belanja Thn } t - 1}{\text{Realisasi Belanja Tahun } t - 1} \times 100\%$$

4. Rasio Efisiensi Belanja

Rasio efisiensi Belanja merupakan perbandingan antara realisasi belanja dengan anggaran belanja. Rasio efisiensi belanja digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah.

$$\frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Perusahaan

Provinsi Sumatera Utara pertama kalinya di bentuk pada tanggal 15 April 1948 berdasarkan Undang – Undang No. 10 Tahun 1948, daerah ini meliputi Keresidenan Aceh,dan Tapanuli Utara. Pembentukan Provinsi Sumatera Utara di atas berdasarkan surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I Sumatera Utara No. 19 Tahun 1973 tertanggal 13 Agustus yang ditetapkan sebagai Hari jadi Provinsi Sumatera Utara.

Adapun tujuan dari perusahaan adalah :

- 1) Membentuk Peraturan Daerah bersama Gubernur.
- 2) Membahas dan memberikan persetujuan Rancangan Peraturan Daerah mengenai APBD yang diajukan oleh Gubernur.
- 3) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan Daerah, APBD, Peraturan Gubernur dan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- 4) Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Gubernur dan wakil Gubernur kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian.
- 5) Memilih Wakil Gubernur dalam hal terjadi kekosongan Jabatan Wakil Gubernur.

2. Deskripsi Data

Data yang digunakan ini adalah data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara dan data primer yang di dapat dari wawancara sebagai data pendukung. Dalam penelitian ini juga termasuk data atas keterangan yang terkait dengan laporan keuangan perusahaan, sesuai dengan permasalahan dan perumusan yang telah dikemukakan.

Belanja modal adalah belanja yang dilakukan untuk investasi permanent, aset tetap, dan aset berwujud lainnya dalam menunjang kegiatan pemerintah dan melakukan pelayanan kepada masyarakat. Belanja modal yang digunakan adalah belanja modal dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) kantor dewan perwakilan rakyat daerah sumatera utara. Berikut ini adalah data Belanja Modal :

Tabel IV.1
Data Belanja Modal
Pada Laporan Realisasi Anggaran DPRD Prov-SU
Tahun 2014-2017

Tahun	Anggaran	Realisasi
2014	6.405.406.250	5.532.630.000
2015	929.900.000	767.518.000
2016	13.239.590.000	1.618.568.887
2017	4.371.983.355	3.103.541.250

Sumber : Laporan Keuangan DPRD SUMUT

Dari tabel IV.1 terlihat bahwa realisasi anggaran pada tahun 2016 tidak terealisasikan secara signifikan. Berikut adalah hasil wawancara dengan salah satu pegawai tetap pada kantor dewan perwakilan rakyat daerah sumatera utara, adapun penyebab anggaran tidak terealisasikan secara signifikan adalah karena pengalihan anggaran belanja modal ke belanja barang dan jasa dan dialihkan ke hutang pemerintah.

3. Analisis Data

a. Analisis Varians Belanja

Analisis varians belanja digunakan untuk mengukur perbedaan antara belanja yang dianggarkan dan realisasi belanja yang telah dimanfaatkan. Analisis varians belanja diukur dengan melihat selisih antara pemanfaatan belanja secara realisasi dengan belanja yang dianggarkan. Menurut Suryani Fajrin (2018) semakin kecil selisih antara anggaran dan realisasi belanja maka pemerintah pada umumnya telah memanfaatkan APBD khususnya belanja daerah dengan baik.

Menurut (Mahmudi, 2010:157) analisis varians belanja dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Analisis Varians Belanja} = \text{Anggaran Belanja} - \text{Realisasi Belanja}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2014} &= 6.405.406.250 - 5.532.630.000 \\ &= 872.776.250 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2015} &= 929.900.000 - 767.518.000 \\ &= 162.382.000 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2016} &= 13.239.590.000 - 1.618.568.887 \\ &= 11.621.021.113 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2017} &= 4.371.983.355 - 3.103.541.250 \\ &= 1.268.442.105 \end{aligned}$$

Tabel IV.2
Selisih Anggaran dan Realisasi Belanja Modal
Tahun 2014-2017

Tahun	Anggaran	Realisasi	Selisih
2014	6.405.406.250	5.532.630.000	872.776.250
2015	929.900.000	767.518.000	162.382.000
2016	13.239.590.000	1.618.568.887	11.621.021.113
2017	4.371.983.355	3.103.541.250	1.268.442.105

Sumber : Data diolah (2019)

Dari data hasil perhitungan diatas tahun anggaran 2014 menunjukkan anggaran sebesar Rp.6.405.406.250 dan realisasi belanja sebesar Rp.5.532.630.000 sehingga ini menimbulkan selisih sebesar Rp.872.776.250. Tahun anggaran 2015 menunjukkan anggaran sebesar Rp. 929.900.000 dan realisasi belanja sebesar Rp.767.518.000 sehingga selisihnya sebesar Rp.162.382.000. Tahun anggaran 2016 menunjukkan anggaran sebesar Rp.13.239.590.000 dan realisasinya Rp.1.618.568.887 sehingga selisihnya Rp.11.621.021.113. Dan tahun anggaran 2017 menunjukkan anggaran sebesar Rp.4.371.983.355 dan realisasi belanjanya sebesar Rp.3.103.541.250 sehingga menimbulkan selisih Rp.1.268.442.105.

Untuk tahun anggaran 2014 dan 2015 selisih anggaran dan realisasinya menunjukkan adanya pemanfaatan belanja sebesar Rp.872.776.250 dan Rp.162.382.000. Untuk tahun anggaran 2016 dan 2017 terjadi selisih anggaran yang sangat signifikan yaitu sebesar Rp.11.621.021.113 dan Rp.1.268.442.105.

a. Analisis Pertumbuhan Belanja

Analisis pertumbuhan belanja bermanfaat untuk mengukur perkembangan belanja dari tahun ke tahun bersifat positif atau negatif. Analisis pertumbuhan belanja dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pertumbuhan masing – masing belanja, apakah pertumbuhan tersebut rasional dan dapat dipertanggung jawabkan.

Menurut (Mahmudi, 2010:160) analisis pertumbuhan belanja dirumuskan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Realisasi Belanja Thn } t - \text{Realisasi Belanja Thn } t - 1}{\text{Realisasi Belanja Tahun } t - 1} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2014} &= \frac{5.532.630.000 - 0}{0} \times 100\% \\ &= 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2015} &= \frac{767.518.000 - 5.532.630.000}{5.532.630.000} \times 100\% \\ &= (0,86) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2016} &= \frac{1.618.568.887 - 767.518.000}{767.518.000} \times 100\% \\ &= 1,10 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2017} &= \frac{3.103.541.250 - 1.618.568.887}{1.618.568.887} \times 100\% \\ &= 0,91 \end{aligned}$$

Tabel IV.3
Pertumbuhan Belanja Modal
Tahun 2014-2017

Tahun	Realisasi Anggaran	Tingkat Pertumbuhan
2014	5.532.630.000	0
2015	767.518.000	(0,86)
2016	1.618.568.887	1,10
2017	3.103.541.250	0,91

Sumber : Data diolah (2019)

Berdasarkan data diatas dapat dilihat untuk tahun anggaran 2014 – 2017 tingkat pertumbuhan mengalami fluktuasi, pada tahun 2016 dan 2017 tingkat pertumbuhan bernilai positif yaitu 1,10 dan 0,91 sedangkan untuk tahun 2015 tingkat pertumbuhan bernilai negatif yaitu (0,86) disebabkan oleh realisasi anggaran belanja modal mengalami penurunan secara signifikan hal ini terjadi karena anggaran belanja modal juga mengalami penurunan signifikan dari tahun sebelumnya.

c. Analisis Keserasian Belanja

Berdasarkan analisis ini dapat diketahui porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk belanja modal pada kantor dewan perwakilan rakyat daerah sumatera utara. Analisis ini dilakukan untuk mengukur persentase jumlah realisasi anggaran yang digunakan untuk membiayai kegiatan fisik pembangunan, dinilai apakah sudah mampu dalam menjalankan kegiatan pembangunannya atau sebaliknya.

Belum ada patokan yang pasti berapa besarnya Rasio belanja modal terhadap APBD yang ideal, karena sangat dipengaruhi oleh dinamisasi kegiatan pembangunan dan besarnya kebutuhan investasi yang diperlukan untuk mencapai pertumbuhan yang ditargetkan. Namun menurut Mahmudi (2010 hal.164 dalam

skripsi laryza sk tahun 2016) pada umumnya proporsi belanja modal dengan belanja adalah antara 5 – 20%.

Menurut (Mahmudi, 2010:160) analisis keserasian belanja dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Belanja Modal} = \frac{\text{total belanja modal}}{\text{total belanja}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2014} &= \frac{5.532.630.000}{75.025.088.011} \times 100\% \\ &= 7,38 \% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2015} &= \frac{767.518.000}{75.922.284.775} \times 100\% \\ &= 1,01\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2016} &= \frac{1.618.568.887}{117.114.676.766} \times 100\% \\ &= 1,38\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2017} &= \frac{3.103.541.250}{182.282.182.329} \times 100\% \\ &= 1,70\% \end{aligned}$$

Tabel IV.4
Analisis Keserasian Belanja Modal
Tahun 2014-2017

Tahun	Total Belanja Modal	Total Belanja	Rasio belanja Modal
2014	5.532.630.000	75.025.088.011	7,28 %
2015	767.518.000	75.154.766.775	1,01%
2016	1.618.568.887	117.114.676.766	1,38%
2017	3.103.541.250	182.282.182.329	1,70%

Sumber : Data diolah (2019)

Dapat dilihat dari tabel diatas belanja modal yang dikeluarkan oleh kantor dewan perwakilan rakyat daerah sumatera utara untuk belanja modal tahun 2014 rasio belanja modal sebesar 7,28%. Untuk tahun 2015 rasionya mengalami penurunan sebesar 1,01%. Untuk tahun 2016 rasionya mengalami kenaikan sebesar 1,38. Untuk tahun 2017 rasionya kembali mengalami kenaikan sebesar 1,70%.

d. Rasio Efisiensi Belanja

Rasio efisiensi belanja merupakan perbandingan antara realisasi belanja dengan anggaran belanja. Rasio efisiensi belanja digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah.

Menurut Mahmudi (2010 : 166) rasio efisiensi belanja dirumuskan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2014} &= \frac{5.532.630.000}{6.405.406.250} \times 100\% \\ &= 86 \% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2015} &= \frac{767.518.000}{929.900.000} \times 100\% \\ &= 83\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2016} &= \frac{1.618.568.887}{13.239.590.000} \times 100\% \\ &= 12\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2017} &= \frac{3.103.541.250}{4.371.983.355} \times 100\% \\ &= 71\% \end{aligned}$$

Tabel IV.5
Rasio Efisiensi Belanja Modal
Tahun 2014-2017

Tahun	Anggaran	Realisasi	Rasio Efisiensi %
2014	6.405.406.250	5.532.630.000	86 %
2015	929.900.000	767.518.000	83 %
2016	13.239.590.000	1.618.568.887	12 %
2017	4.371.983.355	3.103.541.250	71 %

Sumber : Data diolah (2019)

Berdasarkan data diatas diketahui tahun 2014 rasio efisiensi belanjanya sebesar 86%, pada tahun 2015 rasio efisiensi belanja turun menjadi 83%, pada tahun 2016 rasio efisiensi belanja kembali turun secara signifikan menjadi 12% dan pada tahun 2017 rasio efisiensi belanja kembali meningkat sebesar 71%.

B. PEMBAHASAN

1. Kinerja Anggaran Belanja Modal Dilihat Dari Analisis Varians Belanja

Hasil dari analisis data untuk tahun anggaran 2014 dan 2015 selisih anggaran dan realisasinya menunjukkan adanya pemanfaatan belanja sebesar Rp.872.776.250 dan Rp.162.382.000. Menurut Suryani Fajrin (2018) semakin kecil selisih antara anggaran dan realisasi belanja maka pemerintah pada umumnya telah memanfaatkan APBD khususnya belanja daerah dengan baik. Namun untuk tahun anggaran 2016 dan 2017 terjadi selisih anggaran yang sangat signifikan yaitu sebesar Rp.11.621.021.113 dan Rp.1.268.442.105.

Adapun hasil wawancara menyatakan penyebab anggaran belanja modal tidak terealisasikan secara signifikan yaitu karena adanya pengalihan anggaran dari belanja modal ke belanja barang dan jasa, dan anggaran juga dialihkan ke hutang pemerintah. Adapun hasil dari wawancara dampak jika anggaran belanja modal tidak terealisasikan secara signifikan tidak terlalu berdampak ke kegiatan pembangunan namun sangat berdampak terhadap kinerja yang menurun pada kantor dewan perwakilan rakyat daerah sumatera utara.

Dari pembahasan diatas dapat dilihat bahwa kinerja anggaran belanja modal pada tahun 2016 dan 2017 dilihat dari analisis varians belanja kinerja kantor dewan perwakilan rakyat daerah menurun karena belum mampu memanfaatkan anggaran belanja modal yang direncanakan dengan baik.

2. Kinerja Anggaran Belanja Modal Dilihat Dari Pertumbuhan Belanja

Hasil dari analisis data pertumbuhan belanja pertumbuhannya mengalami fluktuasi. Menurut Mahmudi (2010:142) analisis pertumbuhan belanja bermanfaat untuk mengetahui perkembangan belanja dari tahun ke tahun. Pada umumnya belanja memiliki kecenderungan untuk selalu naik. Alasan kenaikan belanja biasanya dikaitkan dengan penyesuaian terhadap inflasi, perubahan kurs rupiah, perubahan jumlah cukupan layanan, dan penyesuaian faktor makro ekonomi.

Dapat dilihat dari tahun 2016 yaitu 1,01 dan pada tahun 2017 yaitu 0,91. Namun pada tahun 2015 pertumbuhan belanjanya bernilai negatif yaitu (0,86) hal ini disebabkan oleh realisasi anggaran belanja modal mengalami penurunan secara signifikan hal ini terjadi karena anggaran belanja modal juga mengalami penurunan signifikan dari tahun sebelumnya.

Adapun dari hasil wawancara penyebab menurunnya belanja modal karena minimnya realisasi, dan adapun hasil dari wawancara dampak menurunnya anggaran belanja modal yaitu berkurangnya porsi belanja daerah otomatis mengurangi pekerjaan pegawai terhadap realisasi anggaran belanja modal.

Dari pembahasan diatas dapat dilihat dari hasil analisis data pertumbuhan belanja kantor dewan perwakilan rakyat daerah sumatera utara cenderung bernilai positif kecuali tahun 2015 bernilai negatif yang disebabkan menurunnya anggaran belanja modal dari tahun sebelumnya, dan dilihat dari hasil wawancara penyebab dan dampak dari menurunnya anggaran belanja modal tidak ada menyatakan kinerja yang kurang baik. Jadi kinerja anggaran dilihat dari pertumbuhan belanja kinerjanya sudah baik.

3. Kinerja Anggaran Belanja Modal Dilihat Dari Keserasian Belanja

Hasil dari analisis data proporsi belanja modal tahun 2014 rasio belanja modal sebesar 7,28%. Untuk tahun 2015 rasionya mengalami penurunan sebesar 1,01%. Untuk tahun 2016 rasionya mengalami kenaikan sebesar 1,38%. Untuk tahun 2017 rasionya kembali mengalami kenaikan sebesar 1,70%. Menurut Mahmudi (2010 hal.164 dalam skripsi laryza sk tahun 2016) pada umumnya proporsi belanja modal dengan belanja adalah antara 5 – 20%.

Tahun 2014 rasio belanja modal sebesar 7,38% proporsinya berada diantara 5 – 20%. Untuk tahun 2015 rasionya mengalami penurunan sebesar 1,01% namun proporsinya tidak berada diantara 5 – 20%. Untuk tahun 2016 rasionya mengalami kenaikan sebesar 1,38% namun masih belum mencapai proporsi antara 5 – 20%. Untuk tahun 2017 rasionya kembali mengalami kenaikan sebesar 1,70% rasionya juga tidak berada di proporsi 5 – 20%.

Dari hasil wawancara menyatakan kriteria penilaian porsi belanja modal terhadap belanja daerah di kantor dewan perwakilan rakyat daerah sumatera utara berdasarkan atas realisasi. Adapun porsi belanja modal terhadap belanja daerah tidak sesuai kriteria yang ditentukan disebabkan oleh sesuainya kebutuhan yang diinginkan bukan sesuai kebutuhan yang dianggarkan.

Dari hasil pembahasan diatas hanya tahun 2014 biaya yang dikeluarkan oleh kantor dewan perwakilan rakyat daerah sumatera utara dalam pembelanjaan modal mampu dalam menjalankan kegiatan untuk kebutuhan kegiatan pembangunan. Sedangkan untuk tahun 2015 – 2017 kantor dewan perwakilan rakyat daerah sumatera utara dianggap belum mampu dalam menjalankan kegiatan untuk kebutuhan kegiatan pembangunannya.

4. Kinerja Anggaran Belanja Modal Dilihat Dari Rasio Efisiensi Belanja

Dilihat dari hasil analisis data tahun 2014 rasio efisiensi belanjanya sebesar 86%, pada tahun 2015 rasio efisiensi belanja turun menjadi 83%, pada tahun 2016 rasio efisiensi belanja kembali turun menjadi 12% dan pada tahun 2017 rasio efisiensi belanja kembali meningkat sebesar 71%. Menurut Mahmudi (2010) jika angka yang dihasilkan dari rasio kurang dari 100% maka dinilai telah melakukan efisiensi belanja. Hal ini menunjukkan rasio efisiensi belanja tidak ada yang melebihi dari 100% hal ini juga membuktikan bahwa kantor dewan perwakilan rakyat daerah telah melakukan penghematan atas anggaran.

Hal ini didukung dari hasil wawancara yaitu realisasi tidak pernah melebihi anggaran setiap tahunnya karena realisasi harus sesuai dengan budget anggaran yang disesuaikan. Dari pembahasan diatas dapat dilihat bahwa kinerja anggaran belanja modal dilihat dari rasio efisiensi belanja kinerjanya sudah baik.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah kinerja anggaran belanja modal dilihat dari analisis varians belanja, analisis keserasian belanja, analisis pertumbuhan belanja dan rasio efesiensi belanja.

1. Kinerja Anggaran Belanja Modal dilihat dari Analisis Varians Belanja

Untuk tahun 2016 dan tahun 2017 kinerjanya menurun, disebabkan anggaran belanja modal yang sudah direncanakan di alihkan ke belanja barang dan jasa dan dialihkan ke hutang pemerintah sehingga kantor dewan perwakilan rakyat daerah sumatera utara belum mampu memanfaatkan anggarannya dengan baik.

2. Kinerja Anggaran Belanja Modal dilihat dari Keserasian Belanja

Dilihat dari proporsinya kinerja kantor dewan perwakilan rakyat daerah sumatera utara dikatakan belum mampu dalam menjalankan kegiatan untuk kebutuhan kegiatan pembangunannya dikarenakan porsinya belum mampu mencapai porsi pada umumnya.

3. Kinerja Anggaran Belanja Modal dilihat dari Pertumbuhan Belanja

Walaupun pertumbuhan belanja mengalami fluktuasi dan pada tahun 2015 pertumbuhannya bernilai negatif disebabkan karena menurunnya anggaran belanja modal karena minimnya realisasi namun pertumbuhan belanja cenderung bernilai positif. Jadi kinerja anggaran belanja modal dilihat dari pertumbuhan belanja modal kinerjanya sudah baik.

4. Kinerja Anggaran dilihat dari Rasio Efisiensi Belanja

Dari tahun 2014 – 2017 realisasi anggaran belanja modal tidak ada yang melebihi anggaran belanja modal, ini menunjukkan bahwa kantor dewan perwakilan rakyat daerah telah melakukan penghematan atas anggaran dan hal ini juga didukung dari hasil wawancara bahwa realisasi anggaran harus sesuai dengan budget anggaran yang disediakan maka kinerja anggaran belanja modal dilihat dari rasio efisiensi belanja kerjanya dikatakan sudah baik.

B. Saran

1. Untuk kinerja anggaran belanja modal kantor dewan perwakilan rakyat daerah Sumatera Utara agar meningkatkan kinerja dalam pengelolaan anggaran belanja daerah khususnya belanja modal supaya pelaksanaan tugas dan fungsi pengendalian internal dari masing – masing unsur dapat berjalan baik, efektif dan efisiensi.
2. Kantor dewan perwakilan rakyat daerah Sumatera Utara harus mempertahankan kinerja belanja yang sudah baik karena realisasinya tidak ada yang melebihi dari yang dianggarkan, dengan memperhatikan anggaran dan realisasinya.
3. Kantor dewan perwakilan rakyat daerah Sumatera Utara ini harus memperhatikan kinerja dalam pengelolaan belanja daerah dari APBD yang diterima.

4. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan untuk lebih rinci lagi dalam menganalisa kinerja kantor dewan perwakilan rakyat daerah sumatera utara. Dan hendaknya menambah tahun yang digunakan dan menganalisis keseluruhan anggaran belanja modal sehingga dapat memperoleh hasil yang lengkap.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Syukri dan Jhon Andra Asmar, 2006. Prilaku Oportunistik Legislatif dalam Penganggaran Daerah. Simposium Akuntansi Nasional IX, Padang.
- Andhika Harist Radita, (2017) “Analisis realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2012-2016 pada badan pengelola keuangan dan aset daerah kota bekasi”. (*Skripsi yang dipublikasikan*).
- Azuar Juliandi, dkk (2015). Metodologi Penelitian Bisnis. Medan:UMSU PRESS
- Cenissa Sajow, dkk (2017) “Analisis realisasi anggaran belanja daerah pada pemerintah kota tomohon dan pemerintah kabupaten minahasa selatan”. (*Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Vol.5 No.2/Juni 2017*).
- Eka Nurmala Sari, dkk. (2015). Akuntansi Sektor Publik. Medan:Perdana Publishing
- Grace Yunita Liando, dkk. (2016). “Analisis kinerja belanja dalam laporan realisasi anggaran (LRA) pada dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten kepulauan sangihe”. (*Jurnal EMBA Vol.4 No.1/Maret 2016*).
- Julita, dkk (2016). Penganggaran Perusahaan. Bandung:CitaPustaka Media
- Kristina Widyaningsih, (2006). “Analisis realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD)”. (*Skripsi yang dipublikasikan*).
- Maila Niamas, (2017). Fungsi dan Manfaat Anggaran (lengkap). <https://www.akuntansilengkap.com>
- Nafarin,M (2012), *Penganggaran Perusahaan, EdisiRevisi*, Jakarta: Salemba Empat.
- Nurfiat Kadir, (2015) “Analisis anggaran pendapatan dan belanja daerah kota tidore kepulauan (studi kasus pendapatan daerah kota tidore kepulauan).” (*Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Vol.1 No,009/2015*).
- Pemerintah Republik Indonesia, 2001. Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Anggaran.<http://www.kemendagri.go.id>
- Pemerintah Republik Indonesia, 2001. Keputusan Presiden No. 74 Tahun 2001 Tentang Tatacara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. <http://jdih.menlh.go.id>

- Pemerintah Republik Indonesia, 2004. *Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang.*
<http://jdih.kemenkeu.go.id>
- Pemerintah Republik Indonesia, 2004. *Undang-undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.*
<http://jdih.kemenkeu.go.id>
- Peraturan Menteri dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Keuangan Tahun 2015 tentang Petunjuk Penyusunan Dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran.
- Sakina Tantri, (2018) “Analisis kinerja anggar belanja pada dinas kebudayaan daerah istimewa yogyakarta tahun 2012 – 2016”. (Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia, Vol. 1 No, 1 Maret 2018)
- Suryani Fajrin, (2018). “Anlisis belanja modal dan sisa lebih pembiayaan anggaran dalam laporan realisasi anggaran pada dinas pekerjaan umum kota medan”. (*Skripsi yang dipublikasikan*).
- Welsch, dkk. (2012). *Anggaran Perencanaan dan Pengendalian Laba*. Buku 1. Jakarta: Salemba Empat.

Lembar Wawancara

Analisis Kinerja Anggaran Belanja Modal Dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pada Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara

Objek Wawancara	Analisis Kinerja Anggaran Belanja Modal Dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pada Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara
Tempat Wawancara	Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara
Nama Mahasiswa	Peni Indah Sastri
Nama Pegawai	Hasanuddin Ambarifa
Waktu Wawancara Dilakukan	14 Maret 2019

No	Analisis Kinerja Anggaran Belanja Modal Dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pada Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara	Jawaban responden
1.	Apa sajakah bagian LRA di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara?	<p>Bagian dari LRA adalah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Belanja langsung - Belanja tidak langsung
2.	Informasi apa saja yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran?	Realisasi Belanja langsung dan tidak langsung
3.	Apakah penyebab anggaran belanja modal tidak terealisasi secara signifikan?	Karena pengalihan anggaran dan belanja modal ke belanja barang dan jasa dan dialihkan ke rumah pemerintah

4.	Bagaimanakah dampaknya jika anggaran belanja modal tidak terealisasi secara signifikan?	Tidak terlalu berdampak ke kegiatan tapi sangat berdampak terhadap kinerja yang menurun
5.	Apakah penyebab menurunnya anggaran belanja modal?	Karena minimnya Realisasi
6.	Apakah penyebab meningkatnya anggaran belanja modal?	Banyak kebutuhan untuk pengadaan perlengkapan, persediaan dsb.
7.	Apakah dampak menurunnya anggaran belanja modal?	Berkurangnya porsi belanja modal otomatis mengurangi pekerjaan pegawai terhadap realisasi anggaran belanja modal
8.	Apakah ada kriteria penilaian porsi belanja modal terhadap belanja daerah di kantor dewan perwakilan rakyat?	Realisasi
10.	Apakah penyebab porsi belanja modal tidak sesuai kriteria yang ditentukan?	Sesuai kebutuhan yang ditunjukkan

11.	Apakah realisasi melebihi anggaran setiap tahunnya?	Tidak, karena sesuai dengan budget anggaran yang ditetapkan
-----	-----------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------

Medan, 11 Maret 2019



(HMSAUNDIR AS-SARITM)

An. Sekretaris DPRD Prov.SU

Kepala Bagian Keuangan Sekretaris DPRD



Tya. Nurchayya, MSP
Pembina TK. I

NIP. 19631011 198409 2 001

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : PENI INDAH SASTRI
Tempat /Tgl Lahir : Marbau Selatan, 1 Juni 1997
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Jl. Kapten Muchtar Basri Ampere 7 No 42
Anak Ke : 1 dari 3 bersaudara

Nama Orang Tua

Ayah : Suliadi
Ibu : Misri
Alamat : Perkebunan Labuhan Haji Kota Aekkanopan

Pendidikan Formal

1. SD Negeri 118181 Kampung Jawa
2. SMP Negeri 3 Marbau
3. SMA Negeri 1 Kualuh Hulu
4. Kuliah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Tahun 2019

Medan, Maret 2019



PENI INDAH SASTRI



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
**FAKULTAS EKONOMI DAN
BISNIS**

Jl. Kapten Mukhtar Beari No. 1 Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

PERMOHONAN JUDUL PENELITIAN

No. Agenda: 482/DL/SKR/AKT/FEB/UMSU/2018/2018

Kepada Yth.
Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
di Medan

Medan, 28/1/2018

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : neni indah austry
NPM : 1503120636
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : keuangan

Dalam rangka proses penyusunan skripsi, saya bermohon untuk mengajukan judul penelitian berikut ini:

Identifikasi Masalah : Pengawasan atas anggaran dilakukan oleh Dewan, tujuannya agar lebih tercapainya sasaran yang telah ditetapkan dan tegurnya pengawasan keuangan daerah pada daerah pada dasarnya adalah untuk menjamin dilaksanakannya berbagai upaya dilaksanakannya berbagai upaya penghematan, efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan keuangan daerah, seberapa aktif peran dewan dalam meningkatkan fungsi pengawasan dengan mitra kerjanya di lembaga eksekutif sehingga tercapainya pengelolaan keuangan daerah yang ekonomis, efektif dan efisien, apakah pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh signifikan terhadap peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah, bagaimana pengetahuan DPRD kota medan tentang anggaran dalam pengawasan keuangan daerah

Rencana Judul

1. Analisis pengetahuan dewan perwakilan rakyat daerah tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah
2. Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kapabilitas anggota DPRD terhadap pengawasan keuangan (APBD) daerah
3. Pengaruh komitmen organisasi dan pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap peran DPRD dan pengawasan keuangan daerah

Objek/Locasi Penelitian : Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara

Demikianlah permohonan ini saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Hormat Saya
Pemohon

Neni Indah Austry



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
**FAKULTAS EKONOMI DAN
BISNIS**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3, Medan, Telp. 861-6614567, Kode Pos 20223

PERSETUJUAN JUDUL PENELITIAN

Nomor Agenda: 482/DU/SKR/ART/FEB/UMSU/28/11/2018

Nama Mahasiswa :
 NPM :
 Program Studi :
 Konsentrasi :
 Fakultas :
 Tanggal Pengajuan Judul :
 Judul yang diajukan Program Studi :
 Nama : atau :
 Alamat / Judul lainnya :

Nama Dosen pembimbing :
 Tanggal akhir disetujui Dosen Pembimbing :
Supriatna Harun H.P., SE, SS, M.Si
Analisis Kinerja anggaran belanja modal pada Kantor Dewan Perwakilan rakyat daerah
17/12/2018

Disahkan oleh :
 Ketua Program Studi :
(Firdan Saragih, SE, M.Si)

Medan, 4-12-2018
 Dosen Pembimbing :
Supriatna Harun H.P., SE, SS, M.Si



PERMOHONAN IZIN PENELITIAN

Medan, 24 Desember 2011

Kepada Y.B.
Ketua/Sekretaris Program Studi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSI
Di
Medan

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : P a n i l i n d a h S a s t r i

NPM : 1 5 0 5 1 7 0 6 3 6

Tempat Tgl. Lahir : M A R B A U S E L A T A H D I J U
N I 1 9 9 7

Program Studi : Akuntansi /
Manajemen

Alamat Mahasiswa : J i n M u c h t a r B a s r i A
M p a r a 7 H O A 2

Tempat Penelitian : S e k r e t a r i a t D e w a n P e
r w a k i l i a n R a k y a t D a e r
a h p r o v S U

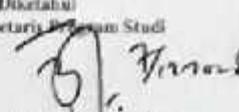
Alamat Penelitian : J i n i m a m b o n j o i H O S
M e d a n

Memohon kepada Bapak untuk pembuatan izin Penelitian sebagai syarat untuk memperoleh data dan identifikasi masalah dari perusahaan tersebut guna pengujian judul penelitian.

Berikut saya lampirkan syarat-syarat lain:

1. Transkrip nilai sementara
2. Kwitansi SPP telah berjalan

Demikianlah permohonan ini saya buat dengan sebenarnya, atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih

Diketahui
Ketua/Sekretaris Program Studi

Filiani Saragih SE MSi

Wassalam
Permohon

Pani Indah Sastri



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : rektor@umsu.ac.id

**PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING
PROPOSAL / SKRIPSI MAHASISWA**

NOMOR : 9131/TGS/IL3-AU/UMSU-05/F/2018

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, berdasarkan *Persetujuan* permohonan judul penelitian Proposal / Skripsi dari Ketua / Sekretaris :

Program Studi : Akuntansi
Pada Tanggal : 28 November 2018

Dengan ini menetapkan Dosen Pembimbing Proposal / Skripsi Mahasiswa :

Nama : Peni Indah Sastri
N.P.M : 1505170636
Semester : VII (Tujuh)
Program Studi : Akuntansi
Judul Proposal / Skripsi : Analisis Kinerja Anggaran, Belanja Modal Dalam Realisasi Anggaran (LRA) Pada Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara

Dosen Pembimbing : *Seprida Hanum Harahap., SE., SS., M.Si*

Dengan demikian di izinkan menulis Proposal / Skripsi dengan ketentuan :

1. Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Proposal/ Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.
2. Pelaksanaan Sidang Skripsi harus berjarak 3 bulan sejak dikeluarkannya surat Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi.
3. **Proyek Proposal / Skripsi** dinyatakan " **BATAL** " bila tidak selesai sebelum Masa Daluarsa tanggal : **21 Desember 2019**

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Ditetapkan di : Medan
Pada Tanggal : 13 Rabiul Akhir 1440 H
21 Desember 2018 M

Dekan *[Signature]*



[Signature]
H. J. NURI, SE, MM, M.Si



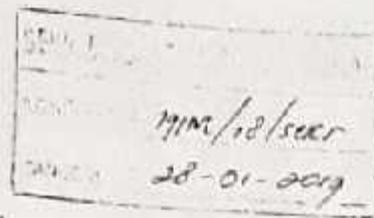
MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : rektor@umsu.ac.id

Nomor : 7731 /IL3-AU/UMSU-05/ F / 2018
Lampiran : -
Perihal : IZIN RISET

Medan, 02 Rabiul Akhir 1440 H
10 Desember 2018 M

Kepada
Yth. Bapak / Ibu Pimpinan
Sekretariat DPRD Prov. SU
Jln. Imam Bonjol No. 5 Medan
Di-
Tempat.



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa kami akan menyelesaikan studi, untuk itu kami memohon kesediaan Bapak / Ibu untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di **Perusahaan / Instansi** yang Bapak / Ibu pimpin, guna untuk penyusunan skripsi yang merupakan salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1)

Adapun mahasiswa di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : Peri Indah Sastri
NPM : 1505170636
Semester : VII (Tujuh)
Program Studi : Akuntansi

Demikian lah surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang Bapak / Ibu berikan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekan ✓



H. ANURI, SE, MM, M.Si.

Tembusan :

1. Wakil Rektor II UMSU Medan
2. Mahasiswa
3. Peringgal.



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

Jl. Imam Bonjol No. 5 Telp. (061) 4575001 - 4523043 Fax. (061) 4522270
M E D A N

Humas dprsumut@gmail.com

Kode Pos 20112

Nomor : 258 /18/Sekr
Lampiran :
Perihal : Izin Riset

Medan, 31 Januari 2019

Kepada Yth :

Dekan Fakultas Ekonomi dan
Bisnis UMSU
di-
M e d a n

Berdasarkan surat dari Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU
Nomor : 7731/IL.3-AU/UMSU-05/F/2018 tanggal 10 Desember 2018 Perihal Izin
Riset, dengan ini memberikan Izin Kepada:

Nama : Peni Indah Sastru
N P M : 1505170636
Semester : VII (Tujuh)
Jurusan : Akuntansi

Untuk Melaksanakan Riset di Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara,
dengan ketentuan mematuhi segala peraturan yang berlaku di Sekretariat DPRD
Provinsi Sumatera Utara.

Demikian disampaikan, atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih

an SEKRETARIS DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA
KASUBBAG TATA USAHA DAN KEPEGAWAIAN



NIP. 196403121985092001



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Lengkap : PENINDAH SASTRI
N.P.M : 1505170636
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI KEUANGAN
Judul Proposal : ANALISIS PENGETAHUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG ANGGARAN TERHADAP PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH

Tanggal	Deskripsi Bimbingan Proposal	Paraf	Keterangan
01/12/2019	perbaiki latar belakang masalah - identifikasi masalah - rumusan masalah - tujuan dan manfaat penelitian		
03/12/2019	Cari teori terkait dgn permasalahan - tambahkan jurnal		
29/12/2019	perbaiki definisi operasional " teknik analisis data perbaiki daftar pustaka		
31/12/2019	Selesai bimbingan Ass		

Pembimbing Proposal

SEPRIDA HANUM HRP, SE, SS, M.Si

Medan, Desember 2018
Diketahui / Disetujui
Ketua Program Studi Akuntansi

FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si



BERITA ACARA SEMINAR JURUSAN AKUNTANSI

Pada hari ini Senin, 11 Februari 2019 telah diselenggarakan seminar jurusan Akuntansi
 merangkai bahwa :

Nama : PENI INDAH SASTRI
 N.P.M. : 1505170636
 Tempat / Tgl. Lahir : MEDAN SELATAN, 01 JUNI 1997
 Alamat Rumah : AMPERA 7 NO.42
 Judul/Proposal : ANALISIS PENGETAHUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 TENTANG ANGGARAN TERHADAP PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH
 Disetujui / tidak disetujui *)

Item	Komentar
	Judul disempurnakan
	Uraian lebih dijelaskan identifikasi masalah, rumusan masalah, teori dikemukakan kerangka berfikir
	kegiatan penelitian
	Sistematisasi penulisan, Daftar Pustaka.
Perbaikan Minor	
Perbaikan Mayor	

Seminar Ulang
Pending 14/2 - 2019
 Medan, 11 Februari 2019

TIM SEMINAR

Ketua

 FITRIANI SARAGIH, SE, M.SI

Sekretaris

 ZULIA HANUM, SE, M.SI

Pembimbing

 SEPRIDA HANUM, SE, M.SI

Pemanding

 HENNY ZURIKA LBS, SE, M.SI



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No. 3 Tel. (061) 5024557 Ext. 304 Medan 220238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN PROPOSAL

Berdasarkan hasil Seminar proposal Jurusan Akuntansi yang diselenggarakan pada hari
Senin, 11 Februari 2019 menerangkan bahwa:

Nama : PENI INDAH SASTRI
N.P.M. : 1505170636
Tempat / Tgl.Lahir : MEDAN SELATAN, 01 JUNI 1997
Alamat Rumah : AMPERA 7 NO.42
Judul Proposal : ANALISIS PENGETAHUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH TENTANG ANGGARAN TERHADAP PENGAWASAN
KEUANGAN DAERAH

Proposal dinyatakan syah dan memenuhi Syarat untuk menulis Sekripsi dengan
pembimbing: *Septida Hanum Hrp, SE, SS, M.Si 2/2019*

Medan, 11 Februari 2019

TIM SEMINAR

Ketua

FITRIANI SARAGIH, SE, M.SI

Sekretaris

ZULIA HANUM, SE, M.SI

Pembimbing

SEPRIDA HANUM, SE, M.SI

Pembanding

HENNY ZURIKA LBS, SE, M.SI

Diketahui / Disetujui
An. Dekan
Wakil Dekan I

ADE GUNAWAN, SE, M.SI



MAJELIS PENBIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : rektor@umsu.ac.id

Nomor : 1231/II.3-AU/UMSU-05/E/2019
Lamp. :-
Hal : MENYELESAIKAN RISET

Medan, 29 Jumadil Akhir 1440 H
06 Maret 2019M

Kepada
Yth. Bapak / Ibu Pimpinan
Sekretariat DPRD Prov. SU
/Jl. Inam Borjöl No. 5
Medan

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan Mahasiswa kami akan menyelesaikan Studinya, mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan kesempatan pada Mahasiswa kami melakukan Riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin, guna untuk *melanjutkan Penyusunan / Penulisan Skripsi pada Bab IV - V*, dan setelah itu Mahasiswa yang bersangkutan mendapatkan Surat Keterangan Telah Selesai Riset dari Perusahaan yang Bapak/Ibu Pimpinan, yang merupakan salah satu persyaratan dalam penyelesaian **Program Studi Strata Satu (S1)** di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan :

Adapun Mahasiswa tersebut adalah

Nama : Peni Indah Sastru
N.P.M : 1505170636
Semester : VIII (Delapan)
Program Studi : Akuntansi
Judul Skripsi : Analisis Kinerja Anggaran Belanja Modal Dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pada Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara

Demikianlah harapan kami, atas bantuan dan kerjasama yang Bapak/Ibu berikan, Kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan


FARUKA
FANURI, SE, MM, MSI

Tembusan :

1. Wakil Rektor - II UMSU Medan
2. Peringatan



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Jl. Imam Bonjol No. 5 Telp. (061) 4575001 - 4523043 Fax. (061) 4522270
M E D A N

mailto:dpdsumut@gmail.com

Kode Pos 20112

SURAT KETERANGAN

Nomor : 696 /18/Sekr

Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswa/i tersebut di bawah ini dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yaitu :

Nama	: Peri Indah Sastri
NPM	: 1505170636
Semester	: VIII (Delapan)
Jurusan	: Akuntansi

Telah selesai melaksanakan Riset di Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara
Jln. Imam Bonjol No. 5 Medan.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, 13 Maret 2019

a.n. SEKRETARIS DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA
KASUBBAG TATA USAHA DAN KEPEGAWAIAN



NIP. 19640312 198509 2 001